

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Sejak pelaksanaan reformasi pada tahun 1999, pemerintah Indonesia telah menerapkan desentralisasi sebagai strategi untuk mencapai pemerintahan yang lebih efisien dan efektif. Situasi ini berlanjut dengan upaya meningkatkan kepercayaan publik melalui penyediaan informasi yang tepat dan inisiatif untuk memperkuat tanggung jawab sosial dari pemerintah. Pemerintah berupaya meningkatkan pelayanan publik dengan menerapkan manajemen keuangan yang baik, agar dapat memberikan layanan yang berkualitas dan transparan (Agung & Mulyani, 2020). Namun harapan ini belum sepenuhnya terwujud, disebabkan masih banyaknya kasus korupsi, praktik suap, rendahnya integritas, serta penipuan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyalahgunaan dana dapat menguntungkan individu tertentu yang memiliki tugas dalam pengelolaan anggaran dan bertanggung jawab kepada masyarakat mengenai penggunaan dana tersebut. Ini bisa berdampak buruk terhadap kondisi keuangan dan layanan pemerintah kepada masyarakat serta menyebabkan ketidakstabilan (Oktaviani & Sari, 2020).

Pentingnya pertanggungjawaban dalam pemerintahan yang diatur oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Upaya ini bertujuan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan dengan menyampaikan laporan keuangan yang berkualitas. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa laporan keuangan harus terstruktur dan menggambarkan posisi keuangan serta transaksi yang dilakukan. Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan tanggung jawab Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan wewenangnya (Atharrizka dkk., 2021).

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Begitu juga ruang lingkup keuangan pemerintahan yang menyajikan laporan keuangan atas dana yang diperoleh. Laporan keuangan dalam ruang lingkup pemerintahan diatur secara jelas berdasarkan aturan atau ketentuan hukum. Prinsip penyajian laporan keuangan

pemerintahan sama dengan prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan akuntansi, yang membedakan adalah komponen dan struktur laporan keuangannya. Tujuan dari pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna dalam hal menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan sumber daya yang ada serta pengambilan keputusan (Wiranti & Wahidawati, 2021).

Kualitas laporan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam menunjang keberlangsungan dan kemajuan sistem keuangan. Nilai efisiensi didorong dengan adanya pengelolaan anggaran secara sistematis akan memberikan potensi berupa peningkatan atas semakin akuratnya penulisan pelaporan keuangan daerah sehingga posibilitas terhadap terjadinya kecurangan penulisan yang terindikasi korupsi maupun kolusi dapat diminimalkan. Melihat perkembangan sistem tata kelola dan arus informasi yang semakin cepat dan kompleks disertai dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang kemudian mengakibatkan munculnya beragam unit usaha baru baik berupa bidang-bidang organisasi perangkat daerah yang lebih tinggi berdampak terhadap peningkatan terhadap pendapatan daerah dimana hal ini tentu memerlukan adanya sistem pengelolaan yang baik, terarah, sistematis dan efisien sehingga seluruh pendapatan dapat tercatat dengan jelas dan mampu dipertanggungjawabkan secara maksimal melalui bukti-bukti transaksi pendapatan maupun catatan-catatan yang sesuai dengan realisasi dana pendapatan daerah yang masuk di dalam periode tersebut (Widiastuti dkk., 2023).

Kualitas pengelolaan keuangan daerah yang optimal terindikasi atas nilai pencatatan yang lebih detil, cepat dan sesuai dengan realisasi nilai pendapatan serta alokasi di lapangan tanpa adanya catatan-catatan terkait penganggaran yang hilang atau tidak tercatat. Seiring berkembangnya waktu sistem pengelolaan keuangan dari sektor pemerintahan selalu mengalami perkembangan yang berkelanjutan dari tahun ke tahun untuk meraih kualitas pelaporan keuangan yang lebih maksimal dimana OPD atau organisasi perangkat daerah berperan penting di dalam realisasi hal tersebut. Dari sektor pemerintahan, maupun swasta tidak dapat terpaku pada suatu sistem konsep pengelolaan keuangan tetapi semuanya selalu melakukan pengembangan untuk tercapainya pengelolaan keuangan yang lebih efisien. Secara garis besar terdapat dua macam sistem pengelolaan keuangan akuntansi yang

diterapkan pemerintah yaitu sistem akuntansi berbasis kas dan berbasis akrual. Basis akuntansi adalah sekumpulan prinsip pengelolaan keuangan dalam menentukan kapan pengaruh suatu transaksi harus dilakukan pengakuan guna pelaporan keuangan.

Keuntungan dari laporan yang memiliki kualitas baik bagi pengguna menjadi indikator bahwa laporan keuangan tersebut memiliki nilai yang tinggi. Prinsip-prinsip yang mesti diterapkan dalam hal ini meliputi akuntabilitas, relevansi, dan penerapan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, yang merupakan salah satu elemen kunci untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan, dijelaskan bahwa laporan dianggap berkualitas jika memenuhi karakteristik kualitatif yang meliputi relevansi, keandalan, kemampuan untuk dibandingkan, dan pemahaman, serta pelaksanaan akrual yang bisa dilakukan secara bertahap.

Adapun para pemakai yang berkepentingan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yaitu masyarakat, pimpinan atau anggota DPRD, lembaga pemberi pinjaman dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pemerhati keuangan sektor pemerintah. Agar laporan keuangan pemerintah daerah bermanfaat bagi para pihak yang berkepentingan, maka laporan keuangan pemerintah daerah tersebut harus berkualitas. laporan keuangan pemerintah daerah disebut berkualitas apabila informasi yang disajikan telah memenuhi karakteristik kualitatif yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Salah satu pengukuran kualitas laporan keuangan pemerintah yaitu dari opini yang diberikan oleh BPK. BPK RI menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah dikatakan sudah berkualitas apabila laporan keuangan pemerintah daerah mendapat penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) setiap tahunnya. Ketika BPK memberikan opini WTP terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Banyaknya kasus-kasus mengenai buruknya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Indonesia masih menjadi isu terhangat yang perlu dikaji lebih dalam. Dasar

pemikiran ini berasal dari fakta bahwa terdapat penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh BPK dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah.

Pemerintah yang baik di pusat maupun daerah harus terus memperbaiki laporan keuangan untuk mencapai transparansi kepada masyarakat. Laporan keuangan merupakan media pertanggungjawaban kinerja keuangan pemerintah kepada publik dan harus mengandung informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Wijayanti, 2021). Namun, masih banyak laporan keuangan yang tidak mendapatkan opini WTP, menunjukkan adanya data yang tidak sesuai dan penyimpangan yang ditemukan oleh BPK.

**Tabel 1.1 Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Jambi**

No	Tahun	Opini BPK
1	2017	WTP
2	2018	WTP
3	2019	WTP
4	2020	WTP
5	2021	WTP
6	2022	WTP
7	2023	WTP

(Sumber: data diolah peneliti, 2025)

Dari tabel 1.1, dapat dilihat bahwa Pemerintah Kota Jambi selama periode 7 tahun antara 2017 hingga 2023 berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini tidak mengurangi prestasi yang diperoleh oleh organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Jambi. Meskipun demikian, masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki terkait laporan hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan daerah. Melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Jambi selama tahun 2017 hingga 2023, dapat disimpulkan bahwa mutu laporan keuangan Pemerintah Kota Jambi sepenuhnya memenuhi kriteria yang diharapkan dalam karakteristik laporan keuangan pemerintah. Ini menunjukkan bahwa daerah yang mendapatkan penilaian audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) memiliki laporan

keuangan yang bebas dari masalah dan kesalahan, yang tentunya akan meningkatkan mutu laporan keuangannya.

Berbagai penelitian terdahulu telah melakukan penelitian terkait pengaruh faktor-faktor terhadap kualitas laporan keuangan. Namun, penelitian terdahulu masih menemukan hasil yang inkonsistensi. Oleh karena itu, penelitian ini meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Faktor yang diduga turut memberikan pengaruh pada kualitas laporan keuangan adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (pemerintah) memberikan pertanggungjawaban baik itu penyajian, pelaporan, dan pengungkapan segala aktivitas yang dilaksanakan kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak untuk melihat pertanggungjawaban tersebut. Hal ini diperlukan untuk memenuhi keinginan masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) (Palalangan, 2020).

Akuntabilitas di Pemerintah Kota Jambi telah mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama tujuh tahun berturut-turut sejak 2017 mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Prestasi ini menjadi bukti bahwa upaya perbaikan tata kelola keuangan telah membuahkan hasil positif. Meskipun telah mencapai opini WTP, tantangan tetap ada. Pemerintah Kota Jambi perlu terus meningkatkan efisiensi sistem pengendalian internal dan memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintah agar kualitas laporan keuangan tetap terjaga. Pencapaian ini menunjukkan bahwa dengan komitmen dan upaya perbaikan yang berkelanjutan, akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah dapat ditingkatkan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Selain itu, Kota Jambi juga dikenal dengan inisiatif membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui pencanangan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Upaya ini melibatkan reformasi birokrasi di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyediakan layanan dasar masyarakat. Implementasi Mal

Pelayanan Publik (MPP) juga menjadi bagian dari langkah strategis untuk meningkatkan pelayanan publik berbasis akuntabilitas (jambikota.go.id, 2024).

Penelitian yang dilakukan oleh Berlian & Paddery (2022) menemukan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas yang baik dalam pengelolaan anggaran dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Azza & Nugraeni (2023) menemukan bahwa penerapan akuntabilitas di tingkat pemerintah daerah masih terkendala oleh kurangnya pengawasan yang memadai, yang pada gilirannya berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Meskipun akuntabilitas secara umum berkontribusi pada kualitas laporan keuangan, terdapat tantangan besar dalam penerapannya di tingkat pemerintah daerah yang sering kali menghadapi masalah ketidakakuratan dan manipulasi data. Oleh karena itu perlu adanya penguatan akuntabilitas dalam pemerintah daerah secara signifikan guna mengurangi kesalahan dan penyimpangan dalam laporan keuangan.

Selain akuntabilitas, transparansi juga diidentifikasi sebagai faktor penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Transparansi dibangun atas dasar informasi yang bebas, yang mana seluruh proses kegiatan atau aktivitas pemerintahan dapat diketahui dan diakses secara bebas oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menyebutkan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan dan kejujuran yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah tentang pengelolaan sumber daya yang dipercayakan sesuai peraturan dalam bentuk penyusunan laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Mitan dkk (2023) menemukan bahwa transparansi yang tinggi dalam pengelolaan anggaran daerah dapat mengurangi potensi penyalahgunaan dana dan meningkatkan kredibilitas laporan keuangan yang dihasilkan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Septiani & Jaeni (2023) menemukan bahwa rendahnya tingkat transparansi dalam pengelolaan dana publik, terutama di tingkat pemerintahan daerah, sering kali menyebabkan penyimpangan dalam laporan keuangan yang tidak tercatat secara jelas.

Mencapai kualitas laporan keuangan yang baik yaitu perlu adanya *good corporate governance* (GCG) atau yang disebut tata kelola organisasi yang baik merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas instansi (Kuraesin & Yadiati, 2021). *Good corporate governance* yang baik berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, pertanggung jawaban, dan kesetaraan yang diharapkan dapat membuat laporan keuangan lebih berkualitas. Untuk menghasilkan laporan yang berkualitas, sangat penting organisasi mengutamakan *good corporate governance* (Nurjanah & Handayani, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Nadia & Rizal (2024) menemukan bahwa pengawasan yang efektif melalui dewan komisaris dan komite audit dalam kerangka *good corporate governance* dapat meminimalisir kesalahan dalam laporan keuangan guna mengurangi risiko manipulasi data serta cenderung menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan akurat. *Good corporate governance* adalah faktor pendukung dalam tercapainya tujuan atau sasaran organisasi. Apabila prinsip-prinsip *good corporate governance* dilaksanakan dengan baik, maka operasional organisasi akan berjalan dengan baik pula. Praktik tata kelola pemerintah akan tersaji dalam laporan keuangan dan akan berdampak kepada kualitas keputusan yang akan diambil kemudian. Semakin baik pemerintah menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* atau tata kelola yang baik, maka akan semakin baik juga kualitas laporan keuangan yang dihasilkan dengan mencakup data yang akurat, akuntabel, andal dan relevan dalam pelaporan keuangan. Pencapaian *good corporate governance* yang tercipta dalam organisasi merupakan suatu upaya pemerintah dalam melakukan perubahan mendasar dan pembaruan dalam sistem pemerintahan atau yang dimaksud dengan reformasi birokrasi. Hal ini didukung oleh teori *stewardship* yang menyatakan bahwa pemerintah sebagai *steward* akan lebih mementingkan kepentingan masyarakat atau *principal* daripada kepentingan pribadinya dimana hal itu merupakan salah satu bentuk tata kelola yang baik dalam suatu organisasi Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizka & Sri (2025) menemukan bahwa *good corporate governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan

daerah. Potensi dampak terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh *good corporate governance* dalam pengelolaan dana OPD yang efisien.

Kualitas laporan keuangan daerah juga dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi. Dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat serta peluang besar untuk pemakaiannya, ini memberikan kesempatan bagi berbagai pihak untuk mendapatkan, mengelola, dan memanfaatkan data keuangan daerah dengan cara yang cepat dan tepat. Penggunaan teknologi informasi seperti komputer dan jaringan dalam pengolahan data akan menghasilkan banyak manfaat, baik dari segi keakuratan atau ketepatan hasil kerja serta reputasinya sebagai alat serbaguna (*multiprocessing*) (Arfiansyah, 2020). Penggunaan teknologi informasi berfungsi sebagai sarana pendukung keberhasilan dalam menciptakan visi dan misi terkait pengelolaan keuangan yang efektif. Dengan adanya teknologi informasi, pegawai pemerintah dapat lebih mudah dalam menyusun laporan keuangan serta memproses data keuangan dengan cara yang lebih terstruktur. Penggunaan teknologi informasi ini akan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan yang disebabkan oleh kesalahan manusia, karena setiap kegiatan dalam pengelolaan keuangan akan tercatat dengan lebih teratur, yang pada akhirnya akan menghasilkan laporan keuangan daerah yang lebih berkualitas.

Pemanfaatan teknologi informasi di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Jambi telah menjadi salah satu pilar utama dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Transformasi ini mencakup penerapan berbagai sistem berbasis teknologi, seperti Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Jambi (BPS) dan laporan terbaru, Kota Jambi telah meningkatkan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan indeks 3.1 ([jambi.antaranews.com](http://jambi.antaranews.com), 2024).

Capaian ini melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi tahun 2023 sehingga menjadikan Kota Jambi sebagai satu-satunya daerah di Provinsi Jambi mendapatkan predikat memuaskan. Hal ini juga menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan pemerintahan menjadi lebih optimal, termasuk di OPD. Misalnya, adanya

digitalisasi layanan publik dan pelaporan berbasis teknologi mendukung transparansi serta efisiensi kerja. Dengan adanya evaluasi SPBE, OPD Kota Jambi yang memanfaatkan teknologi informasi dengan baik cenderung memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Namun masih terdapat beberapa OPD yang belum sepenuhnya mampu mengadopsi teknologi karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang terampil dalam teknologi informasi. Infrastruktur teknologi yang belum merata di semua OPD menjadi tantangan dalam memastikan keseragaman sistem.

Penelitian yang dilakukan Pebiana & Halkadri (2025) menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada pemerintah daerah. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa dalam rangka memastikan proses pembangunan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah serta pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi guna meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah dan menyampaikan informasi keuangan daerah kepada publik. Dengan mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi ini diharapkan akan membantu dalam tahap pelaporan keuangan agar pemerintah mampu menyusun laporan keuangan yang dapat diandalkan serta tepat pada waktunya. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggita dkk (2024) menemukan bahwa banyak organisasi terutama di negara berkembang, masih menghadapi tantangan dalam hal infrastruktur teknologi informasi yang memadai dan kemampuan sumber daya manusia untuk memanfaatkan teknologi secara optimal, yang dapat membatasi potensi teknologi dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Selain itu, meskipun penerapan teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi dalam proses pelaporan keuangan, masih ada kekurangan dalam integrasi sistem yang ada dan tantangan terkait dengan keamanan data, yang dapat memengaruhi akurasi dan keandalan laporan keuangan yang dihasilkan

Laporan keuangan yang berkualitas memerlukan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dalam proses penggunaannya. Peraturan tentang sistem

pengendalian internal bagi pemerintahan pusat atau daerah tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Dengan terciptanya penyelenggaraan sistem pengendalian internal yang efektif akan meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan, sehingga berimplikasi terhadap akuntabilitas keuangan daerah (Kapriana & Agung, 2020). Meskipun laporan keuangan pemerintahan pusat dan daerah sudah dikatakan baik dan memperoleh opini WTP, masih banyak terjadi kasus kecurangan dalam pelaporan keuangan. Pada pemerintahan pusat maupun daerah, kasus korupsi masih marak terjadi. Hal tersebut bisa terjadi karena masih ditemukannya kelemahan sistem pengendalian internal. Selain itu, juga pada fasilitas yang telah diberikan pemerintah untuk membantu dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, di beberapa daerah masih belum digunakan secara maksimal. Hal tersebut terjadi karena adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan undang-undang dan peraturan yang diberlakukan dalam penyusunan laporan keuangan.

**Tabel 1.2 Kasus Korupsi di Jambi**

No	Kasus	Keterangan	Referensi
1	Penyelewengan Dana BUMD Siginjai Sakti Jambi	Penyalahgunaan dana penyertaan modal Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi sebesar Rp10 miliar pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Siginjai Sakti.	(Soemarsono, 2025)
2	Pemotongan insentif pajak di BPPRD Kota Jambi	Kepala BPPRD Kota Jambi melakukan tindak pidana korupsi atas pemotongan insentif pajak di BPPRD Kota Jambi, tahun 2017, 2018, dan 2019. Total uang potongan selama 3 tahun itu mencapai Rp 1,2 miliar lebih.	(Hakim, 2022)

No	Kasus	Keterangan	Referensi
3	Kasus korupsi penerimaan siswa baru tahun ajaran 2021/2022 SMA 8 Kota Jambi	Mantan Kepala Sekolah (Kepsek) SMA 8 Kota Jambi diduga melakukan korupsi penerimaan siswa sebanyak 120 orang, di luar PPDB. Besaran uang yang diminta per siswanya variatif, mulai dari Rp2 juta hingga Rp8 juta.	(Eko, 2023)
4	Kasus ATK Disdik Kota Jambi	Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kotajambi, A Rifai dan pejabat pembuat komitmen berinisial S melakukan kasus dugaan korupsi pengadaan alat tulis kantor, di sejumlah sekolah kota jambi tahun 2013 menelan anggaran senilai 1,5 miliar lebih.	(Graham, 2015)

(Sumber: data diolah peneliti, 2025)

Dalam kasus-kasus korupsi diatas, pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 umumnya terkait dengan manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan anggaran, dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini menunjukkan bagaimana ketidakberesan dalam pengelolaan proyek dan anggaran dapat berdampak buruk pada kualitas laporan keuangan. Ketika terjadi korupsi, laporan keuangan yang disajikan menjadi tidak akurat, mencerminkan pengeluaran yang tidak sesuai dengan anggaran yang ditetapkan, atau bahkan mencakup manipulasi angka. Kasus-kasus tersebut mengungkapkan bahwa adanya penyimpangan dana atau proyek yang tidak sesuai spesifikasi menyebabkan laporan keuangan menjadi tidak dapat dipercaya. Selain itu, proses yang tidak transparan dalam pengelolaan proyek dan anggaran

memungkinkan terjadinya manipulasi data dan aliran dana yang tidak tercatat dengan benar. Kurangnya transparansi dalam pengadaan barang dan jasa, pengelolaan anggaran daerah, serta pengesahan RAPBD dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Akuntabilitas sangat terpengaruh oleh ketidaktransparanan dalam pengelolaan anggaran dan proyek. Penyimpangan yang terjadi mengurangi akuntabilitas pemerintah dalam menjelaskan dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada masyarakat. Korupsi menunjukkan kurangnya pertanggungjawaban terhadap dana publik, yang seharusnya dikelola dengan baik untuk kepentingan masyarakat. Disisi lain perlu adanya teknologi informasi yang dapat berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan proyek. Dengan sistem berbasis teknologi yang memungkinkan pemantauan secara *real-time*, penyimpangan dapat dideteksi lebih dini dan laporan keuangan dapat disusun dengan lebih akurat. Teknologi informasi dapat memfasilitasi pelaporan anggaran yang transparan dan pengawasan yang lebih baik terhadap proyek-proyek pemerintah.

Sistem pengendalian internal yang lemah memungkinkan adanya penyalahgunaan wewenang, penyelewengan anggaran, dan kurangnya pengawasan terhadap proyek-proyek publik. Pengendalian internal yang lebih baik akan memastikan bahwa dana digunakan dengan efisien, sesuai dengan peraturan, dan meminimalisir peluang korupsi. Sistem pengendalian yang terintegrasi dengan teknologi informasi juga dapat mempercepat deteksi kesalahan atau penyimpangan.

Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Nadia & Rizal (2024) dengan judul *Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Sistem Pengendalian Internal sebagai Variabel Moderasi* serta penelitian yang dilakukan oleh Cafriana dkk (2024) dengan judul *The Effects of Information Systems and the Utilization of Information Technology on the Quality of Financial Reports with Internal Control as Moderation*. Penelitian sebelumnya berfokus pada di pegawai sub-bagian keuangan dan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu dikembangkan lebih lanjut.

Pengembangan penelitian ini dilakukan untuk menjawab keterbatasan yang ditemukan pada penelitian sebelumnya, seperti objek penelitian, variabel penelitian, serta untuk memperluas cakupan dengan menambahkan variabel baru yaitu akuntabilitas, transparansi dan objek yaitu Organisasi Perangkat Daerah yang terdiri dari dinas, badan, inspektorat dan sekretariat. Berdasarkan fenomena, keterbatasan dan ketidak konsistenan hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan judul “Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Jambi”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan fenomena dan latar belakang masalah diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- A. Apakah terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Jambi?
- B. Apakah terdapat pengaruh transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Jambi?
- C. Apakah terdapat pengaruh *good corporate governance* terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Jambi?
- D. Apakah terdapat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Jambi?
- E. Apakah sistem pengendalian internal memoderasi pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Jambi?
- F. Apakah sistem pengendalian internal memoderasi pengaruh transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Jambi?

- G. Apakah sistem pengendalian internal memoderasi pengaruh *good corporate governance* terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Jambi?
- H. Apakah sistem pengendalian internal memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Jambi?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- A. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Jambi.
- B. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Jambi.
- C. Untuk mengetahui pengaruh *good corporate governance* terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Jambi.
- D. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Jambi.
- E. Untuk mengetahui sistem pengendalian internal memoderasi pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Jambi.
- F. Untuk mengetahui sistem pengendalian internal memoderasi pengaruh transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Jambi.
- G. Untuk mengetahui sistem pengendalian internal memoderasi pengaruh *good corporate governance* terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Jambi.

- H. Untuk mengetahui sistem pengendalian internal memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Jambi

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

##### **A. Manfaat Teoritis**

1. Penelitian ini memperkaya kajian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan menggabungkan elemen-elemen seperti akuntabilitas, transparansi, *good corporate governance*, dan pemanfaatan teknologi informasi, serta menggunakan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi, penelitian ini memperluas pemahaman tentang interaksi antar variabel yang berperan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan di sektor publik.
2. Memberikan bukti empiris mengenai hubungan antara faktor-faktor tersebut dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yang relevan dengan kondisi aktual di Kota Jambi.

##### **B. Manfaat Praktis**

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pemerintah Kota Jambi dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas laporan keuangan mereka dengan cara memperkuat penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, *good corporate governance*, dan teknologi informasi. Dengan sistem pengendalian internal yang baik, kualitas laporan keuangan akan lebih terjaga dan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya.
2. Hasil penelitian dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Misalnya, dalam hal memperkuat pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam setiap proses anggaran dan pelaporan, serta meningkatkan pemanfaatan teknologi untuk mendukung efisiensi pelaporan keuangan.
3. Penelitian ini memberikan manfaat bagi pihak yang berperan dalam pengawasan, seperti BPK, Inspektorat, dan DPRD, dengan memberikan

pemahaman tentang pentingnya sistem pengendalian internal yang kuat dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

### **C. Manfaat Kebijakan**

1. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pemerintah Kota Jambi dalam merumuskan kebijakan untuk memperkuat sistem pengendalian internal di setiap organisasi perangkat daerah, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dan menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat dan terpercaya.
2. Dengan penelitian ini, pemerintah daerah dapat mengevaluasi dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi yang lebih maksimal akan meningkatkan efisiensi dan akurasi laporan keuangan yang dihasilkan

### **D. Manfaat Sosial**

1. Penelitian ini dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pelaporan keuangan daerah, yang pada gilirannya akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Masyarakat dapat lebih yakin bahwa dana publik dikelola dengan baik dan dipertanggungjawabkan secara transparan.
2. Dengan kualitas laporan keuangan yang lebih baik, pemerintah daerah dapat merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan yang lebih efektif dan efisien. Ini akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi anggaran yang tepat sasaran.